

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sedang membangun berbagai sektor berkembang di berbagai aspek ekonomi, seperti pendidikan, infrastruktur, sarana maupun prasarana. Salah satu aspek yang masih terus menerus dibangun adalah sektor perekonomian. Muhammad Rizki Kurniawan di halaman Kompasnia, yang menyebutkan bahwa "belum adanya pemerataan dalam pembangunan, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun pemerataan ekonomi, yang saat ini masih mengalami stagnasi." Faktor ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan” (Kurniawan, 2023). Mengenai ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia telah menjadikannya sebagai landasan dan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat, yang menyatakan bahwa pemerintah bertugas untuk "memajukan kesejahteraan umum”. Struktur ekonomi Indonesia mengacu pada pembagian dan hubungan antar sektor-sektor ekonomi utama yang ada di Negara ini dengan terbagi dalam tiga sektor utama yang meliputi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier.

Struktur ekonomi di sektor primer memiliki hubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dimana sektor primer meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder merupakan sektor yang mencakup keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sedangkan sektor

sekunder memainkan peran penting dalam diversifikasi ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan lapangan kerja. Sektor sekunder mencakup pada industri manufaktur, industri pengolahan sumber daya alam dan industri konstruksi. Selanjutnya, sektor tersier merupakan sektor yang menyediakan jasa dan berfungsi untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan. Sektor tersier sendiri meliputi perdagangan, jasa keuangan dan perbankan, pariwisata, transportasi dan logistik, serta teknologi dan komunikasi.

Berbagai sektor utama ekonomi tentunya dapat memberikan peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Namun kenyataannya masih terdapat permasalahan dan tantangan bagi ekonomi nasional seperti ketimpangan dan keterbatasan penyerapan tenaga kerja yang tentunya akan menghasilkan peningkatan jumlah pengangguran. Kurangnya pengalaman kerja salah satu permasalahan utama dalam ketenagakerjaan adalah terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Permasalahan ini semakin diperburuk oleh krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, yang mempertegas perlunya solusi berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM Indonesia, memiliki peluang untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, memperbaiki distribusi ekonomi, dan mengurangi dampak krisis ekonomi di masa depan.

Menurut (Revo, n.d.) dalam artikel berita CNBC dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja terbanyak berada pada sektor UMKM dengan persentase 97% atau sekitar 117 juta

pekerja dan berkontribusi ke PDB ekonomi nasional sebesar 61%.

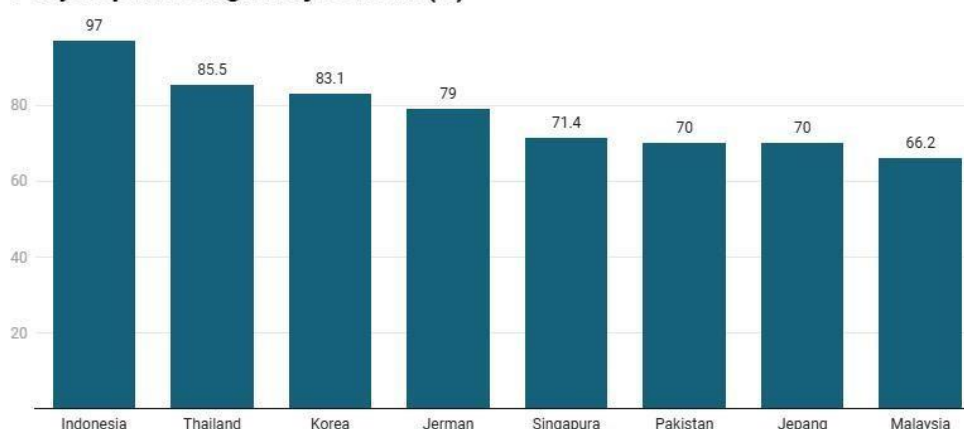
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran Nasional Tahun 2024

Penduduk Bekerja dan Pengangguran	Penduduk Bekerja			Pengangguran		
	2024			2024		
	Februari	Agustus	Tahunan	Februari	Agustus	Tahunan
Persentase (%)	95.18	95.09	-	4.82	4.91	-
Jumlah (Ribu orang)	142.179	144.642	-	7.195	7.466	-

Sumber : BPS Indonesia, 2025

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia yang diuraikan di table 1, dimana pada periode bulan Februari 2024 jumlah penduduk bekerja sebesar 95.18% atau sekitar 142.179 orang dan bulan Agustus mengalami penurunan menjadi 95.09% atau 144.642 orang. Sedangkan data pengangguran pada bulan Februari 2024 sebesar 4.82% atau sekitar 7.195 orang dan mengalami kenaikan per bulan Agustus 2024 menjadi 4.91% atau 7.466 orang (BPS, 2025).

Penyerapan Tenaga Kerja UMKM (%)



Gambar 1. Daya Serap Tenaga Kerja UMKM secara Internasional (%)

Sumber : CNBC Indonesia

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa sektor UMKM Indonesia mampu mengambil alih ekonomi negara dengan menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan Negara lain. Data yang dikutip oleh CNBC (Revo, n.d.) dimana dalam pertemuan pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia menembus angka 97% dilanjut Thailand sebesar 85,5%, Korea sebesar 83,1%, Jerman sebesar 79%, Singapura sebesar 71,4%, Pakistan sebesar 70%, Jepang sebesar 70%, dan Malaysia berada pada angka 66,2%.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam proses pembangunan perekonomian nasional. Terbukti selama krisis akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Ketika banyak usaha besar menggunakan modal besar mengalami kebangkrutan, UMKM tetap bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi suatu keharusan. UMKM memiliki karakteristik sebagai sektor padat karya yang berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja (Sudati Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, 2019). Pengembangan UMKM sendiri merupakan langkah strategis yang didasari oleh beberapa alasan:

1. UMKM telah memiliki kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, kebutuhan utamanya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas, yang lebih mudah dan terarah.
2. Kemungkinan transisi ke usaha kecil. Jika kelompok UMKM diberdayakan secara lebih mendalam dan tepat, mereka memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi sektor usaha kecil.
3. Pengentasan kemiskinan. Pengembangan UMKM yang efektif dapat

mengurangi kemiskinan di kalangan pelakunya, bahkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok fakir miskin, usaha lanjut, dan pengusaha muda. (Siregar)

Kabupaten Magetan dengan wilayah geografis yang cukup strategis di area lereng gunung membuat mayoritas masyarakatnya mengandalkan mata pencaharian di sektor pertanian dan pariwisata. Dengan daya tarik wisatawan terhadap sektor wisata menjadikan masyarakat untuk berwirausaha.

Tabel 2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kab. Magetan, Agustus 2023 dan Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2023 - Ags 2024	
	Orang	Orang	Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	548.863	552.489	3.626	0.66
Angkatan Kerja	430.736	425.639	-5.097	(1.18)
Bekerja	412.830	411.668	-1.162	(0.28)
Pengangguran	17.906	13.971	-3.935	(21.98)
Bukan Angkatan Kerja	118.127	126.850	8.723	7.38

Sumber : BPS Kabupaten Magetan, 2024

Pada table 2 dijelaskan bahwa data yang diambil dari BPS Kab. Magetan dari jumlah penduduk usia kerja Agustus tahun 2023 sebesar 548.863 ribu orang dan meningkat pada bulan Agustus 2024 sebesar 0,66% atau 3.626 menjadi total jumlah penduduk usia kerja sebesar 552.489 orang. Data angkatan kerja yang berkerja bulan Agustus 2023 sebesar 412.830 orang dan mengalami penurunan pada bulan Agustus 2024 sebesar 0,28% atau 1.162 orang menjadi total jumlah penduduk yang berkerja sebesar 411.668 orang. Sedangkan data pengangguran tercatat bulan Agustus 2023 sebesar 17.906 orang dan mengalami penurunan bulan Agustus 2024 sebesar 21.98% atau 3.935 orang menjadi total pengangguran bulan

Agustus 2024 sebesar 13.971 orang. Penduduk yang bermata pencaharian pada fokus berwirausaha menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor penunjang ekonomi selain dari 2 sektor utama sebagai penunjang ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Magetan terus berupaya dalam memajukan UMKM guna mensejahterakan ekonomi masyarakat Magetan (Arum, 2023).

Sektor UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas manajemen, dan kesulitan dalam memperluas jaringan pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dibutuhkan peran pemerintah untuk merefleksi sejarah peran organisasi dalam masyarakat. Organisasi masyarakat telah menjadi bagian penting dari kehidupan di Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan. Pada masa itu, organisasi terbentuk sebagai alat untuk menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring waktu, berbagai organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang semakin beragam sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi global masyarakat modern ditandai dengan adanya perilaku egois dalam masyarakat seperti nilai individual yang sangat berbahaya. Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama umat islam yang memaknai pembangunan dalam artian luas menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (*human development*). Umat islam di Indonesia memiliki organisasi massa sebesar yang salah satunya adalah Muhammadiyah. Organisasi masyarakat (ormas) secara umum memiliki fungsi yang sama yang berguna untuk memberdayakan anggotanya serta bermanfaat bagi masyarakat (Haerisma, 2015).

Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912, bertepatan 8 Dzulhijah 1330 Hijriah, di Kauman, Yogyakarta. Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, dan pendiriannya ditandai berdirinya Madrasah Ibtidaiyah. Bahkan, pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Muhammadiyah telah mendapatkan pengakuan resmi. Dengan diterbitkannya Besluit pada 18 November 1914 No. 81, yang memberikan legitimasi atas keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi yang sah di mata pemerintah Hindia-Belanda. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan terkaya keempat di dunia, estimasi kekayaan mencapai Rp.454,24 triliun. Dalam struktur organisasinya Muhammadiyah mempunyai 31 majelis, lembaga, biro, dan 19.157 unit pimpinan dibawah pimpinan pusat. Warga Muhammadiyah sendiri diperkirakan lebih dari 60 juta atau sekitar 26% dari populasi muslim Indonesia (sumber: <https://goodstats.id/infographic/provinsi-dengan-ormas-terbanyak-2024>).

Tabel 3. Data Amal Usaha Muhammadiyah di Indonesia

No	Bentuk Amal Usaha	Jumlah
1	Pesantren	440
2	TK/PAUD/KB	20.223
3	SD/MI	2.817
4	SMP/MTs	1.826
5	SMA/MA	1.364
6	Perguruan Tinggi	171
7	Rumah Sakit/Klinik	355
8	Panti Asuhan	562

Sumber : Muhammadiyah.or.id

Tabel 3 menunjukkan data amal usaha yang sudah dilakukan dan dikembangkan oleh organisasi Muhammadiyah dimana amal usaha tersebut berupa 440 pesantren, 20.223 bangunan yang meliputi TK/PAUD/ KB, 2.817 gedung

sekolah SD/MI, 1.826 gedung sekolah SMP/MTs, 1.364 gedung sekolah SMA/MA, 171 gedung perguruan tinggi, 355 gedung rumah sakit dan klinik, serta 562 gedung panti asuhan.

Tabel 4 Data AUM Ekonomi Kabupaten Magetan 2025

No	Nama Usaha / Unit Ekonomi	Jenis Usaha	Lokasi	Status Kepemilikan	Omzet / Tahun	Jumlah Karyawan	Keterangan
1	Koperasi Syariah MuMag	Koperasi Syariah	Jl. Diponegoro, Magetan	Milik Persyarikatan	Rp500.000.000	5 orang	Aktif & Berkembang
2	Toko Buku Aisyiyah	Toko Buku & ATK	Jl. Yos Sudarso, Magetan	Milik Aisyiyah	Rp150.000.000	2 orang	Mendukung pendidikan
3	BMT Muhammadiyah Sayut	BMT (Keuangan Mikro)	Sayut, Magetan	Milik Cabang	Rp700.000.000	4 orang	Perlu penguatan SDM
4	Warung Makan Sehat	Kuliner / Catering	Karas, Magetan	Anggota Muhammadiyah	Rp80.000.000	1 orang	Perlu modal usaha
5	Produksi Batik Tulis	Industri Kreatif	Panekan, Magetan	Anggota Aisyiyah	Rp100.000.000	3 orang	Butuh akses pasar

Sumber: PDM Magetan

Berdasarkan table 4 menunjukkan Data AUM sector ekonomi yang sudah diobservasi melalui wawancara oleh sector ekonomi PDM Kabupaten Magetan dengan omzet tertinggi menyentuh angka Rp. 700juta/tahun dari unit usaha BMT Muhammadiyah Sayut dan omzet terendah berada pada angka Rp. 80juta/tahun dari unit usaha Warung Makan Sehat. Status kepemilikan usaha yang dipegang oleh Institusi Muhammadiyah berupa Aisyiyah serta cabang berjumlah 3 unit usaha yaitu Toko Buku Aisyiyah, BMT Muhammadiyah Sayut, Produksi Batik Tulis sedangkan 2 unit usaha lainnya dimiliki status kepemilikan dari anggota yaitu Koperasi Syariah MuMag dan Warung Makan Sehat.

Muhammadiyah merupakan ormas terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dari berbagai sektor di Indonesia. Keberadaan amal usaha ini telah memberikan manfaat bagi lebih dari 25 juta warga Muhammadiyah, serta berkontribusi luas bagi masyarakat Indonesia dan menjadi awal mula berdirinya Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat berfokus pada bidang pendidikan, yang ditandai pendirian lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Selain berperan sebagai gerakan sosia, gerakan Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan ekonomi yang mengusung ideologi ekonomi (Hilal et al., 2024). Sumber yang mendasari adanya kekuatan secara finansial dari Muhammadiyah adalah kasih sayang dari individu didalam Muhammadiyah itu sendiri. Dengan menjalankan berbagai bisnis sekaigus berdakwah menjadikan Muhammadiyah teladan bagi organisasi keagamaan.

Muhammadiyah mulai memperluas peranannya ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu sektor yang menjadi perhatian penting adalah sektor ekonomi, yang bertujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat sehingga peranan majelis dalam bidang perekonomian terus dimaksimalkan atau diciptakan menjadi Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) dimana program tersebut memaksimalkan berbagai rancangan program strategi karena bidang perekonomian merupakan salah satu pilar utama dalam gerakan Muhammadiyah (Hilal et al., 2024). Instrumen perbaikan dan pengembangan moneter suatu daerah dapat berupa spekulasi, industry, inovasi data, dan pelanggan individu, dimana instrument tersebut merupakan factor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan keuangan.

Pada Sektor ekonomi Muhammadiyah berperan sebagai penunjang utama. Saat ini organisasi Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai organisasi islam yang besar di Indonesia. Muhammadiyah memberikan dorongan pada sektor ekonomi salah satunya dengan seperti melalui program pemberian pinjaman modal, pelatihan atau training, dan pengelolaan pembukuan keuangan bagi masyarakat. Upaya-upaya ini menunjukkan keselarasan antara tujuan Muhammadiyah dan tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun dengan demikian, terdapat adanya fakta yang mengatakan bahwa Indonesia masih tergolong negara berkembang.

Muhammadiyah memiliki peran yang semakin strategis dalam bidang ekonomi sebagai bagian dari visinya untuk mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan dan berkeadilan. Sejak awal, Muhammadiyah tidak hanya fokus pada dakwah dan pendidikan, tetapi juga memberi perhatian serius pada pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat kemandirian umat, dan menciptakan keadilan ekonomi. Pendekatan Muhammadiyah dalam bidang ekonomi bersifat praktis, progresif, dan berbasis komunitas, dengan mengedepankan prinsip syariah dan etika Islam. Salah satu bentuk nyata kegiatan ekonomi Muhammadiyah adalah melalui pendirian lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah yang tersebar di berbagai daerah. Lembaga ini berfungsi untuk menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta membantu masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang halal dan produktif. Muhammadiyah juga mengembangkan unit-unit usaha ekonomi seperti toko swalayan, percetakan, penerbitan, hingga pertanian berbasis komunitas. Selain itu,

Muhammadiyah melalui lembaga zakat, infak, dan sedekah seperti Lazismu aktif dalam mendorong kewirausahaan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis keummatan.

Pada beberapa tahun terakhir, Muhammadiyah mulai mengembangkan konsep ekonomi berkemajuan, yaitu pendekatan ekonomi yang berbasis nilai Islam, keadilan sosial, inovasi, dan teknologi. Melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Muhammadiyah mendorong kader dan anggotanya untuk aktif dalam kegiatan bisnis dan kewirausahaan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional. Muhammadiyah juga mengajak warga dan simpatisannya untuk membangun ekosistem ekonomi Islam modern yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai etis dan solidaritas sosial.

Secara keseluruhan, kontribusi Muhammadiyah di bidang ekonomi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan umat dan menjawab tantangan ketimpangan sosial. Dengan memadukan nilai keislaman, manajemen modern, dan semangat kemandirian, Muhammadiyah terus mengembangkan model ekonomi alternatif yang solutif, adil, dan berkelanjutan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu tantangan utama mengapa Indonesia masih tergolong dalam kategori negara berkembang adalah kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan serta belum meratanya distribusi perekonomian bagi Masyarakat Indonesia.

Menurut penelitian dari (Anggraeni et al., 2021) mengatakan bahwasannya melalui langkah-langkah pemberdayaan yang tepat, UMKM tidak hanya menjadi solusi dalam mengatasi masalah ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kunci dalam pembangunan ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal. Namun, di Kabupaten Magetan, pendapatan pelaku UMKM masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sebesar Rp. 2. 238. 808,-. Sebagai organisasi masyarakat keagamaan, Muhammadiyah mengambil peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan yang ada di daerah seperti Magetan. Melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), organisasi ini menyediakan solusi konkret bagi perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Pendayagunaan infaq, sedekah, serta dana dari para dermawan, termasuk perusahaan, menjadi salah satu cara Muhammadiyah mendukung pengembangan UMKM. Dana zakat yang terkumpul digunakan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memberikan bantuan langsung kepada pelaku UMKM.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat menjawab dua hal utama: bagaimana keterlibatan Muhammadiyah dalam pengembangan UMKM, dan bagaimana peran Muhammadiyah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya di Kabupaten Magetan. Oleh karena itu, peneliti mengajukan judul: **“Analisis Keterlibatan ORMAS Muhammadiyah dalam Pengembangan UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Magetan.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran organisasi muhammadiyah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana peran organisasi muhammadiyah dalam penyerapan tenaga kerja di Magetan ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis peran organisasi Muhammadiyah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Magetan, termasuk melalui program pelatihan, bantuan modal, dan pemasaran produk lokal.
 - b. Menggali Pandangan dan Pengalaman Anggota Ormas Muhammadiyah Magetan dan kontribusi Muhammadiyah dalam memperluas lapangan kerja melalui pemberdayaan UMKM dan kegiatan ekonomi lainnya di wilayah Magetan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Mahasiswa

Sebagai wadah untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh saat perkuliahan dengan cara melihat perbandingan teori yang dipelajari dengan praktik yang terjadi di lapangan, selain itu memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendalami isu-isu terkait peran organisasi sosial keagamaan dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di sektor UMKM dan strategi pemberdayaan ekonomi

masyarakat berbasis organisasi keagamaan.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini dapat meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang bidang ekonomi pembangunan, kewirausahaan sosial, dan studi keislaman terapan serta sebagai rujukan dan inspirasi bagi mahasiswa lain yang ingin meneliti topik serupa, sehingga memperkaya karya ilmiah di lingkungan akademik universitas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini mampu menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan studi lanjutan dengan pendekatan berbeda, seperti eksplorasi topik yang lebih luas, seperti pengaruh kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan dalam pembangunan ekonomi atau penggunaan metode penelitian yang lebih spesifik.